

PERANAN SEKTOR PERTANIAN DALAM RANGKA  
PENINGKATAN PENDAPATAN NASIONAL DAN  
PEMERATAAN PENDAPATAN ANTAR DAERAH DI  
INDONESIA TAHUN 2003 - 2007

TESIS

oleh :  
LUSTER SUDARSONO M  
No. BP. 08 212 06 033



PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010

**Peranan Sektor Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Nasional  
dan Pemerataan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia  
Tahun 2003 - 2007**

Oleh : Luster Sudarsono

(Dibawah bimbingan Syafruddin Karimi dan Werry Dartta Taifur)

**RINGKASAN**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencarian penduduknya, dengan demikian sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia mestinya difokuskan pada sektor yang menghidupi mayoritas penduduk yaitu penduduk yang ada di pedesaan dengan profesi sebagai petani. Pengembangan industri mestinya juga difokuskan pada aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan mayoritas. Pada tahun 1997/1998 krisis ekonomi menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki daya tahan yang cukup tinggi terhadap goncangan ekonomi dibandingkan sektor lain

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) seberapa besar sumbangan sektor pertanian dalam PDB; 2) seberapa besar pengaruh sektor pertanian dalam pertumbuhan PDB dan terhadap pemerataan pendapatan antar daerah di Indonesia; 3) bagaimana pengaruh pertumbuhan PDB terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia; 4) mengapa kebijaksanaan program pembangunan sektor pertanian belum mampu sepenuhnya diterapkan secara optimal melalui potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Metode penelitian dilakukan dengan melakukan pengumpulan data sekunder yaitu data PDRB propinsi-propinsi di Indonesia sejak tahun 2003-2007.

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis tersebut meliputi analisis sumbangan sektor pertanian terhadap pertumbuhan PDB dengan *shift share*, untuk melihat hubungan variabel tersebut dengan menggunakan *koefisien korelasi*, untuk menganalisis ketimpangan pendapatan antar daerah dengan menggunakan analisis *regional cross section*, untuk melihat besar kecilnya ketimpangan yang terjadi dengan menggunakan *kurva Lorenz*.

Kesimpulan selanjutnya yang dapat ditarik dari analisis yang telah dilakukan adalah : 1) sektor pertanian masih memegang peranan besar dalam PDB pada periode 2003 – 2007 yaitu sebesar 21,43% dari total PDB. Sedangkan dari rata-rata pertumbuhan PDB setiap tahun yaitu sebesar 5,96%, sumbangan dari sektor pertanian adalah sebesar 0,82%. Demikian juga halnya dalam pemerataan pendapatan antar daerah di Indonesia, sektor pertanian dapat menekan ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia sebesar 14,54% per tahun, akan tetapi peranan tersebut memperlihatkan kecenderungan yang semakin menurun; 2) sektor pertanian mempunyai hubungan yang erat dengan ketimpangan pendapatan antar daerah dan pertumbuhan PDB tetapi arahnya negatif juga. Sedangkan Pertumbuhan PDB mempunyai hubungan yang erat dan bertanda positif dengan ketimpangan pendapatan antar daerah, yang dapat diartikan bahwa pada saat pertumbuhan sektor pertanian meningkat, pertumbuhan PDB cenderung melambat dan ketimpangan pendapatan antar daerah juga menurun, demikian juga sebaliknya ; 3) dari hubungan ketiga variable tersebut di atas adalah, dapat dijelaskan jika kontribusi pendapatan sektor pertanian lebih besar dalam pertumbuhan PDB maka akan berdampak terhadap pemerataan pendapatan yang semakin baik.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencarian penduduknya, dengan demikian sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Keadaan seperti ini menuntut kebijakan pemerintah pada sektor pertanian disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan yang terjadi di lapangan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut kesejahteraan bangsa (Tambunan dalam Setyabudi, 2005).

Kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia mestinya difokuskan pada sektor yang menghidupi mayoritas penduduk yaitu penduduk yang ada di pedesaan dengan profesi sebagai petani. Pengembangan industri mestinya juga difokuskan pada aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan mayoritas (Joseph E. Stiglitz, 2004).

Sejak tahun 1990 perhatian pemerintah mulai diarahkan pada sektor industri dan jasa seiring dengan terjadinya transformasi ekonomi dari negara agraris menjadi negara industri sehingga peran sektor pertanian mulai menurun dalam menyebabkan struktur perekonomian mulai berubah. Fokus pembangunan ekonomi lebih banyak diarahkan pada sektor industri dan jasa. Namun pada tahun 1997/1998 krisis ekonomi menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki daya tahan yang cukup tinggi terhadap guncangan ekonomi dibandingkan sektor lain sehingga dapat menyelamatkan pemerintahan dan negara dari kebangkrutan (Gerard and Ruf, 2001). Dari peristiwa tersebut membuktikan bahwa sektor

pertanian harus tetap mendapatkan perhatian pemerintah karena memiliki dasar yang kuat sebagai penopang perekonomian nasional (Arifin, 2005; Ellis, 2000).

Bukti empiris selama krisis menunjukkan bahwa saat sektor-sektor lain mengalami kontraksi hebat, sektor pertanian tetap mampu tumbuh positif sebesar 0,22 persen, padahal kondisi perekonomian saat itu secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 13,68 persen, Supriyati dan Safa'at (2000), (BPS, 2000). Lebih lanjut Supriyati dan Syafa'at (2000) mengemukakan bahwa selama krisis terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja secara nasional sebanyak 6,4 juta orang, namun keadaan sebaliknya terjadi pada sektor pertanian yang mampu menyerap sebesar 60 persen angkatan kerja nasional.

Pertanian merupakan sektor utama perekonomian bagi sebagian besar negara yang sedang berkembang. Konsekuensinya adalah bahwa kebijakan pembangunan pertanian di negara tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sektor-sektor lainnya. (Shedoulet dan de Janvry, 1995). Sejalan dengan pernyataan tersebut, bukti empirik menunjukkan di beberapa negara, umumnya negara berkembang, sektor pertanian yang berhasil merupakan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan sektor industri dan jasa (El-Said M, 2001).

Potensi pertanian yang besar namun sebagian besar dari petani banyak yang termasuk golongan miskin adalah sangat ironis terjadi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi sektor pertanian secara keseluruhan, yang mengakibatkan timbulnya ketimpangan pendapatan antara orang yang bekerja di sektor pertanian dibandingkan dengan orang yang bekerja di sektor yang lain.

Ketimpangan pembagian pendapatan khususnya di negara-negara berkembang sejak tahun tujuh puluhan telah menjadi perhatian utama dalam menetapkan kebijaksanaan pembangunannya. Perhatian ini timbul karena didasarkan pada pengalaman sebelumnya, dimana kebijaksanaan pembangunan yang mengutamakan pada pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan semakin melebar/meningkatnya ketimpangan pembagian pendapatan tersebut. Hal ini telah dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi terutama oleh Kuznets (1966) dengan hasil penelitiannya di beberapa negara, demikian pula dengan Adelman dan Morris (1993) serta Chennery dan Syrquiun (1995), bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat selalu diikuti dengan meningkatnya ketimpangan pembagian pendapatan terutama pada tahap awal proses pembangunan ekonomi. Hasil penelitian ini telah mengembangkan anggapan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pembagian pendapatan terdapat suatu trade-off, dimana pertumbuhan ekonomi yang pesat akan membawa konsekuensi meningkatnya pembangunan dan hasil-hasilnya. Sebaliknya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang cukup baik hanya akan dicapai dengan pertumbuhan ekonomi yang relative lambat atau diturunkan.

Oleh karena itu timbullah ketidakpuasan maupun kritik, yang pada dasarnya bukanlah sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai akan tetapi perkembangan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut kurang mampu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, bahkan ketimpangan pembagian pendapatan semakin besar dan telah menimbulkan masalah seperti: meningkatnya pengangguran, melebar/jurang perbedaan si

miskin dan si kaya, kurangnya sarana kesehatan dan pendidikan, perumahan, kebutuhan pokok, dan lain-lain.

Kedadaan seperti ini telah dialami negara kita terutama pada periode awal proses pembangunan, dimana strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang difokuskan pada pertumbuhan ekonomi dan pada periode tersebut telah terjadi kecenderungan semakin meningkatnya ketimpangan pendapatan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian antara lain Kelompok Peneliti Pendapatan Daerah tahun 1992.

Berdasarkan pengalaman tersebut, maka pada periode selanjutnya strategi dan kebijaksanaan pembangunan nasional telah diarahkan kepada terciptanya kondisi pembangunan yang mendorong usaha pemerataan pembagian pendapatan yang terjadi sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada Trilogi Pembangunan yang lebih menekankan dan memberi bobot utama pada pemerataan pembangunan dan pembagian pendapatan dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi. Dengan terlaksananya strategi pembangunan dengan pemerataan tersebut yang dilandasi oleh Trilogi Pembangunan ini, maka pembangunan nasional harus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat dengan rasa keadilan. Pembangunan harus mencegah lebarnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, yang berpendapatan tinggi dan yang berpendapatan rendah, golongan ekonomi lemah dan ekonomi kuat, sehingga pembangunan itu akan merata dan menghilangkan disparitas pembangunan dan pendapatan antar daerah. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi harus dicapai dengan meningkatkan produksi berbagai sektor pembangunan, serta

menciptakan kondisi stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dengan melalui penyediaan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang memadai.

Selanjutnya untuk mencapai dan menciptakan produksi tersebut, maka titik berat pembangunan adalah bidang ekonomi dengan prioritas utamanya pada sektor pertanian. Pembangunan sektor pertanian ini secara jelas diarahkan agar menunjang pembangunan daerah dan sekaligus diusahakan agar membantu pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air dan tercapainya keserasian laju pertumbuhan antar daerah. Oleh karena itu ditekankan bahwa pembangunan sektor pertanian akan tetap memegang peranan utama dan dengan perkembangan produksi sektor pertanian diharapkan akan mempengaruhi hasil-hasil pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi.

Untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional 2005 – 2025. Di dalam RPJP tersebut ditetapkan apa yang menjadi visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Indonesia. Visi RPJP nasional 2005-2025 adalah menciptakan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Dalam mewujudkan visi tersebut maka disusun misi pembangunan nasional, yang salah satunya adalah mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan yaitu dengan meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan secara menyeluruh, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Kemudian berdasarkan RPJP nasional tersebut selanjutnya disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional 2004-2009. Di dalam



RPJM nasional 2004-2009 tersebut ditetapkan untuk mencapai visi dan misi yang telah disusun, selanjutnya dibuat agenda pembangunan nasional. Salah satu yang menjadi agenda pembangunan nasional tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka untuk mencapai sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu prioritas yang akan dilakukan adalah dengan revitalisasi pertanian dalam arti luas yang diarahkan untuk mendorong pengamanan ketahanan pangan, diversifikasi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian.

Sampai sejauh mana strategi pembangunan dengan pemerataan pembangunan ini telah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, sampai saat ini belum ada hasil penelitian maupun studi yang memberikan perincian, sementara perkiraan para peneliti tetap pada kesimpulan bahwa ketimpangan pembagian pendapatan masih berjalan terus sebagaimana pertumbuhan ekonomi yang berbeda pada setiap tahun dan setiap daerah atau wilayah. Namun demikian, perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh setiap daerah atau wilayah diharapkan tidak memperbesar ketimpangan pembagian pendapatan baik dalam daerah maupun antar daerah. Apabila dikaitkan dengan pembangunan daerah sebagai bagian pembangunan nasional, khususnya daerah-daerah yang melaksanakan pembangunannya dititikberatkan pada bidang ekonomi dengan prioritas utama pada sektor pertanian, maka pertanyaan yang sama akan muncul demikian pula dengan keinginan untuk mengetahui dan menjawab pertanyaan tersebut.

Dengan melihat potensi sektor pertanian yang cukup besar di Indonesia sebagaimana tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB-nya) serta besarnya

tenaga kerja yang terserap dan besarnya jumlah penduduk yang hidup didalamnya, terlihat bahwa struktur ekonomi Indonesia masih banyak di dukung oleh sektor pertanian

Selanjutnya berdasarkan atas potensi yang cukup besar pada sektor pertanian yang tersebar di seluruh pembangunan di Indonesia, maka dugaan sementara yang dapat diambil adalah:

- (1) Peranan sektor pertanian dalam meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah adalah cukup besar.
- (2) Pengaruh sektor pertanian terhadap perekonomian daerah masih cukup besar dibanding dengan sektor lainnya, namun sumbangan sektor ini mengalami penurunan persentase terhadap PDRB.
- (3) Oleh karena setiap wilayah kegiatan masyarakatnya didominasi oleh sektor pertanian dan relatif sama (homogen), maka tingkat disparitas pendapatan antar daerah akan relatif merata.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Masalah-masalah pokok yang diajukan dalam studi ini adalah:

- (1) Seberapa besar sumbangan sektor pertanian dalam Produk Domestik Bruto (PDB).
- (2) Seberapa besar pengaruh sektor pertanian dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan terhadap pemerataan pendapatan antar daerah di Indonesia.

- (3) Bagaimana hubungan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia.
- (4) Mengapa kebijaksanaan program pembangunan sektor pertanian seperti yang telah tertuang dalam RPJP Nasional 2005-2025 dan RPJM Nasional 2004-2009 belum mampu sepenuhnya diterapkan secara optimal melalui potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

### **1.3 Tujuan Studi**

Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan, studi ini ditujukan untuk menganalisis tentang:

- (1) Sumbangan sektor pertanian dalam dalam Produk Domestik Bruto (PDB).
- (2) Pengaruh perkembangan sektor pertanian terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan terhadap pemerataan pendapatan antar daerah.
- (3) Hubungan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah.
- (4) Kebijaksanaan dan program yang diusulkan untuk dilaksanakan dalam tahap pembangunan berikutnya.

#### **1.4. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berupa indikator-indikator tahunan yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan hasil produk kompilasi, angkatan kerja, jumlah penduduk.

Masalah yang dianalisis dalam tesis ini dibatasi pada data Makroekonomi yaitu data PDRB propinsi-propinsi di Indonesia tahun 2003 - 2007. Adapun tahun dasar PDRB yang digunakan adalah tahun dasar 2000.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 6.1. Kesimpulan

Dari gambaran dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pembangunan nasional dan khususnya terhadap pendapatan nasional. Sektor pertanian masih merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menciptakan peningkatan dan pemerataan pendapatan nasional. Hal ini dapat dimaklumi, karena dari 32 propinsi yang di analisis, ternyata sebanyak 71 % dari propinsi tersebut masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerahnya, walaupun secara nasional sektor pertanian merupakan sektor ketiga terbesar dalam penyumbang pendapatan nasional.

Jika dilihat dari segi pendapatan menurut daerah pembangunan, maka Propinsi Kalimantan Timur dan Papua memperlihatkan struktur ekonomi yang berat di sektor pertambangan dan penggalian, kemudian Propinsi Kep. Riau, Jawa Barat Jawa Tengah dan Banten memperlihatkan struktur ekonomi yang berat di sektor industri, sementara Propinsi Bali, Yogyakarta dan Jawa Timur di sektor perdagangan, hotel dan restoran. Selain daerah yang telah disebutkan di atas, ada sebanyak 23 propinsi (71 %) memperlihatkan struktur ekonomi yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerahnya (PDRB).

Akan tetapi jika dilihat dari segi tenaga kerja atau jumlah penduduk yang hidup di sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri, sektor perdagangan, hotel dan restoran maka akan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tenaga kerja atau penduduk yang hidup di sektor pertanian. Pada tahun 2007 sektor pertanian mampu menyerap angkatan kerja sebesar 41,24 % dari total angkatan kerja, kemudian disusul masing-masing sektor perdagangan, hotel dan restoran 20,57 %, sektor industri pengolahan 12,38 %, Sektor Jasa 12,03 %, sementara sektor yang terkecil menyerap angkatan kerja adalah sektor listrik, gas dan air yaitu sebesar 0,18 %.

Dalam periode tahun 2003 – 2007 sektor pertanian berhasil menyumbang rata-rata 21 % dari pendapatan nasional setiap tahunnya dan juga mampu menyumbang pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,82 % setiap tahunnya dari rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,96 %. Sementara peranannya terhadap pemerataan pendapatan daerah adalah cukup besar seperti yang terlihat dalam Tabel 5.3. Dengan demikian, maka peningkatan pendapatan dalam sektor pertanian bukan saja akan meningkatkan pendapatan daerah atau pendapatan per kapita, akan tetapi sekaligus akan mendorong berkurangnya ketimpangan yang terjadi dalam distribusi pendapatan antar daerah.

Oleh karena itu dalam rangka mencapai sasaran pemerataan pembangunan daerah khususnya pemerataan pendapatan daerah, maka sektor pertanian ini harus mendapat perhatian yang cukup besar. Namun sektor lain seperti sektor industri dan sektor perdagangan harus juga mendapatkan perhatian yang serius, karena

sektor ini telah memperlihatkan kemampuan yang lebih tinggi dalam peningkatan pendapatan nasional.

Berdasarkan uraian di atas terutama gambaran sektor pertanian baik dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun dalam pemerataan pendapatan antar daerah, maka kesimpulan selanjutnya yang dapat ditarik dari analisis yang telah dilakukan adalah :

- (1) Sektor pertanian masih memegang peranan besar dalam PDB pada periode 2003 – 2007 yaitu sebesar 21,43% dari total PDB. Sedangkan dari rata-rata pertumbuhan PDB setiap tahun yaitu sebesar 5,96%, sumbangan dari sektor pertanian adalah sebesar 0,82%. Demikian juga halnya dalam pemerataan pendapatan antar daerah di Indonesia, sektor pertanian dapat menekan ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia sebesar 14,54% per tahun, akan tetapi peranan tersebut memperlihatkan kecenderungan yang semakin menurun.
- (2) Sektor pertanian mempunyai hubungan yang erat dengan ketimpangan pendapatan antar daerah dan pertumbuhan PDB tetapi arahnya negatif. Sedangkan Pertumbuhan PDB mempunyai hubungan yang erat dan bertanda positif dengan ketimpangan pendapatan antar daerah (regional income inequity), yang dapat diartikan bahwa pada saat pertumbuhan sektor pertanian meningkat, pertumbuhan PDB cenderung melambat dan ketimpangan pendapatan antar daerah juga menurun, demikian juga sebaliknya.

- (3) Dari hubungan ketiga variable tersebut di atas adalah, dapat dijelaskan jika kontribusi pendapatan sektor pertanian lebih besar dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) maka akan berdampak terhadap pemerataan pendapatan yang semakin baik (ketimpangan pendapatan antar daerah akan semakin menurun).
- (4) Sektor pertanian dengan potensi yang dimilikinya sebenarnya masih sangat mungkin untuk dijadikan tulang punggung perekonomian nasional, khususnya dalam rangka mencapai sasaran pemerataan pendapatan di Indonesia.

## **6.2. Rekomendasi**

Dengan melihat peranan sektor pertanian, terutama pada saat krisis dan yang telah dicapai dalam periode 2003 – 2007 di Indonesia baik terhadap peningkatan dan pemerataan pendapatan nasional maupun terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), maka seharusnya sektor ini mendapat perhatian yang besar dalam program dan kebijakan pembangunan nasional ke depan. Perhatian tersebut terutama dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yaitu peningkatan dan pemerataan pendapatan nasional.

Hal yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana cara meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Karena dari hasil penelitian, daerah-daerah yang masyarakatnya lebih banyak bekerja di sektor pertanian dan mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor yang dominan sebagai sektor pendukung dalam PDRBnya ternyata mempunyai pendapatan per kapita yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah yang mengandalkan sektor diluar sektor



pertanian sebagai sektor pendukung dalam PDRBnya seperti sektor industri, sektor pertambangan, sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Dalam penelitian ini tidak dilakukan penelitian secara detail mengenai mengapa produktivitas di sektor pertanian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan sektor lainnya, misalnya sektor industri, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sehingga disarankan bagi yang ingin meneliti lebih lanjut agar melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan produktivitas pertanian lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor lain.

Maka dengan potensi yang dimiliki oleh bangsa ini pada sektor pertanian, maka seharusnya dilakukan penetapan program pembangunan sektor pertanian yang terarah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan nasional khususnya dalam meningkatkan pendapatan petani. Program yang terarah maksudnya adalah program yang mempunyai dampak langsung terhadap petani seperti : (1) pembenahan infra struktur pedesaan ; (2) kemudahan dalam mengakses permodalan ; (3) pembangunan industri pedesaan; (4) pembinaan sumber daya manusia, sehingga bisa menghasilkan produk pertanian yang lebih berdaya saing.

Peningkatan pada sektor pertanian ini sekaligus mendorong peningkatan sektor lainnya, seperti sektor industri, perdagangan, jasa dan lainnya. Sehingga dengan demikian, peningkatan sektor pertanian yang lebih besar akan seiring dengan sektor non pertanian dan selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta keseimbangan struktur ekonomi nasional.

Prospek pertumbuhan output di sektor pertanian, dapat berpengaruh kepada proyeksi kesempatan kerja untuk satu periode di masa yang akan datang pada sektor tersebut maupun sektor lain. Kondisi ini menyebabkan perlunya campur tangan dari pemerintah guna menitik beratkan program pembangunan pada sektor pertanian yang berpotensi untuk dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Prioritas tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran yang cenderung semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, dan juga dapat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelman, Irma and Robinson, Sherman., (1989). *Income Distribution and Development*, Handbook of Development Economics, Vol II
- Adelman, Irma and Morris, Cynthia Taff, *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*, Standford University Press, 1990
- Ahluwalia, Montek., (1986). *Income Distribution and Development: Some Stylized Facts*, American Economic Review-Pappers and Proceedings, 1976: 128-135
- Arifin, Bustanul. 2005. *Pembangunan Pertanian Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi*, PT. Grasindo Pustaka Utama. Jakarta
- Brown J.A. Burrows. M.E. *Regional Economic Problem*, 1987
- B. Wiwoho & Tribuana Said. *Indonesia Source Book 1994*. Jakarta; National Development Information Office, 1994
- Chenery, Hollis , *Redistribution With Growth*, 1981
- David Newbery, *A Theorem Measurement Inequality*, *Journal of Economic Theory*, Churchill College, Cambridge - England ,1970
- Ellis Frank. 2000. *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford University Press. New York
- El-Said, M. H. Lofgren, Sherman Robinson, *The Alternative Development Strategies on Growth with a Dynamic Model for Egypt*, Working Paper, Trade and Macroeconomics Devision Research Institute, 2001
- Esmara, Hendra. (1986). *Perencanaan Dan Pembangunan Di Indonesia*. Penerbit Gramedia, Jakarta
- Garerd F. and Ruf F., 2001. *Agriculture in Crisis: People, Commodities and Natural Resources in Indonesia, 1996- 2000*. Curzon Press. Richmond. UK.